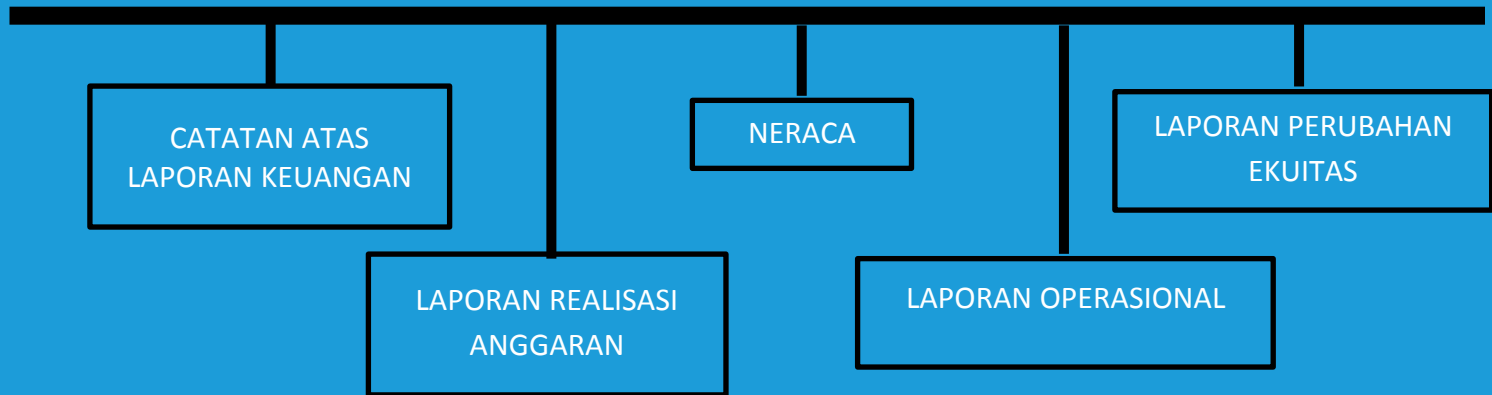


# LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU



# KATA PENGANTAR

---

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Diskominfo) Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diskominfo Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo Banjarbaru merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan penyajian Laporan Keuangan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Dengan memperhatikan hasil kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika diharapkan laporan ini bisa memberikan masukan bagi penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa mendatang yang berorientasi pada pencapaian visi Diskominfo Banjarbaru yaitu “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Menggunakan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Yang HARAT (Handal, Aman, Responsif Dan Terintegrasi)”

Banjarbaru, Februari 2018

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,**

**JOHAN ARIFIN, AP, MM  
NIP. 19750328 199501 1 001**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN</b>	
<b>    PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	7
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto .....	7
2.2 Kebijakan Keuangan .....	8
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah.....	9
2.2.2 Kebijakan Umum Anggaran .....	12
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD .....	12
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	19
3.2 Hambatan dan Kendala Penyerapan Anggaran Dikaitkan	
Dengan Pencapaian Kinerja Yang Telah Ditetapkan .....	21
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>25</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan .....	25
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan.....	26
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan.....	26
4.3.1 Pengukuran Pendapatan .....	26
4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja .....	27
4.3.3 Pengukuran Transfer .....	27
4.3.4 Pengukuran Pembiayaan .....	28
4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas .....	28
4.3.6 Pengukuran Piutang .....	28
4.3.7 Pengukuran Persediaan .....	32
4.3.8 Pengukuran Investasi .....	33
4.3.9 Pengukuran Aset Tetap .....	35
4.3.10 Penyusutan Aset Tetap .....	36

4.3.11	Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	36
4.3.12	Pengukuran Aset Lainnya.....	37
4.3.13	Pengukuran Kewajiban.....	38
4.3.14	Pengukuran Ekuitas .....	38
4.3.15	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP .....	39
4.3.16	Penyajian Kembali (Retreatment) .....	40
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>		<b>41</b>
5.1	Laporan Realisasi Anggaran .....	41
5.1.1	Pendapatan .....	41
5.1.2	Belanja.....	41
5.1.2.1	Belanja Operasi .....	41
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai .....	42
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa .....	42
5.1.2.1.3	Belanja Hibah.....	43
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial .....	43
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah desa .....	43
5.1.2.2	Belanja Modal .....	43
5.1.2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin ....	44
5.1.2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	45
5.1.2.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	45
5.1.2.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya .....	46
5.1.2.2.5	Belanja Aset Lain .....	46
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga.....	46
5.1.3	Pembiayaan Netto .....	46
5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan.....	47
5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan.....	47
5.1.3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) .....	47
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	48
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal .....	48
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .....	48
5.3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .....	48

5.3.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	48
5.3	Neraca .....	49
5.3.1	Aset Lancar .....	49
5.3.1.1	Kas di Kas Daerah .....	49
5.3.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran .....	49
5.3.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan .....	49
5.3.1.4	Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional .....	49
5.3.1.5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah.....	50
5.3.1.6	Kas Lain-lain .....	50
5.3.1.7	Investasi Jangka Pendek .....	50
5.3.1.8	Piutang Pajak.....	50
5.3.1.9	Penyisihan Piutang Pajak .....	50
5.3.1.10	Piutang Retribusi .....	50
5.3.1.11	Penyisihan Piutang Retribusi .....	50
5.3.1.12	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya .	51
5.3.1.13	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Yang Sah .....	51
5.3.1.14	Piutang Bagi Hasil Provinsi.....	51
5.3.1.15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	51
5.3.1.16	Belanja di Bayar dimuka .....	51
5.3.1.17	Persediaan.....	51
5.3.2	Investasi Jangka Panjang.....	52
5.3.2.1	Investasi Non Permanen.....	52
5.3.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) ...	52
5.3.3	Aset Tetap .....	52
5.3.3.1	Tanah .....	53
5.3.3.2	Peralatan dan Mesin .....	53
5.3.3.3	Gedung dan Bangunan.....	62
5.3.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan .....	63
5.3.3.5	Aset Tetap Lainnya .....	64
5.3.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	65
5.3.3.7	Akumulasi Penyusutan .....	65
5.3.4	Dana Cadangan .....	65
5.3.5	Aset Lainnya .....	66

5.3.5.1	Aset Tak Berwujud.....	66
5.3.6	Kewajiban .....	67
5.3.6.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	67
5.3.6.2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....	67
5.3.6.3	Utang Bunga.....	67
5.3.6.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	67
5.3.6.5	Pendapatan Diterima Dimuka .....	67
5.3.6.6	Utang Belanja .....	67
5.3.6.7	Kewajiban Dikonsolidasikan .....	68
5.4	Laporan Operasional .....	69
5.4.1	Pendapatan LO .....	69
5.4.2	Beban LO .....	69
5.4.2.1	Beban Operasi.....	69
5.4.2.2	Beban Pegawai.....	69
5.4.2.3	Beban Barang dan Jasa .....	70
5.4.2.4	Beban Hibah .....	72
5.4.2.5	Beban Bantuan Sosial .....	72
5.4.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	72
5.4.2.7	Beban Penyisihan Piutang.....	72
5.4.2.8	Beban Pegawai BOS .....	72
5.4.2.9	Beban Transfer .....	73
5.4.2.10	Surplus/Defisit LO .....	73
5.5.	Laporan Perubahan Ekuitas.....	74
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>		<b>75</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>76</b>

## LAMPIRAN

# DAFTAR LAMPIRAN

---

Lampiran 1	Neraca
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran 3	Laporan Operasional
Lampiran 4	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 5	Surat Tanda Setoran Orisinil Sisa UP Tahun Anggaran 2017
Lampiran 6	Berita Acara Barang Perhitungan Fisik Barang Persediaan Per 29 Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Lampiran 7	Kertas Kerja Peralatan dan Mesin
Lampiran 8	Kertas Kerja Gedung dan Bangunan
Lampiran 9	Kertas Kerja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran 10	Kertas Kerja Aset Tetap Lainnya
Lampiran 11	Kertas Kerja Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)
Lampiran 12	Lampiran Bukti Utang Beban Listrik dan Telpon

# DAFTAR LAMPIRAN

---

Lampiran 1	Neraca
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran 3	Laporan Operasional
Lampiran 4	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 5	Surat Tanda Setoran Orisinil Sisa UP Tahun Anggaran 2017
Lampiran 6	Berita Acara Barang Perhitungan Fisik Barang Persediaan Per 29 Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Lampiran 7	Kertas Kerja Peralatan dan Mesin
Lampiran 8	Kertas Kerja Gedung dan Bangunan
Lampiran 9	Kerta Kerja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran 10	Kertas Kerja Aset Tetap Lainnya
Lampiran 11	Kertas Kerja Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)
Lampiran 12	Lampiran Bukti Utang Beban Listrik dan Telpon



# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

### a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

### c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan :

- a) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai.
- b) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai.
- c) Menyediakan informasi / data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

## **1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Surplus/ defisit Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## **2 Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang Pajak dan bukan pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Ekuitas Dana

### **3 Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

### **4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE menyajikan sekurang-kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang berlangsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

### **5 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru

### 1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

#### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

#### BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

## BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
  - 5.1.4 Pembiayaan
  - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
  - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
  - 5.2.5 Lain-Lain
  - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
  - 5.3.1 Aset Lancar
  - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
  - 5.3.3 Aset Tetap
  - 5.3.4 Aset Lainnya
  - 5.3.5 Kewajiban
  - 5.3.6 Ekuitas Dana
- 5.4 Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan-LO
  - 5.4.2 Beban
  - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO

## 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

5.6.3 Koreksi-Koreksi

5.6.4 Ekuitas Akhir

## BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

## BAB VII Penutup

## BAB II

# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD



### 2.1 Ekonomi Makro

#### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu alat ukur yang dapat memberikan gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Selain itu, data PDRB juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, analisa dan perencanaan yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi.

Kontribusi lapangan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di era globalisasi sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Perkembangan kategori informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru dan daerah-daerah lainnya tidak lepas dari perkembangannya secara nasional. Kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikasi/proksi mengenai sampai sejauh mana kemajuan teknologi yang ada di suatu wilayah. Pangsa kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru sebesar 4,63 persen selama tahun 2016.

Pertumbuhan kategori lapangan usaha dan informasi mencapai 8,75 persen selama tahun 2016. Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya penggunaan gadget dan pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu

pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi akan terus meningkat, dan akan memberikan dampak pada produktivitas dunia usaha.

Selain faktor pendorong yang telah disebut, kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru juga tidak luput dari peningkatan animo masyarakat untuk mendapatkan hiburan (video shooting perayaan acara), serta peningkatan permintaan percetakan, baik digital printing maupun surat kabar. Selain itu, maraknya bisnis secara online diduga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi karena akan semakin meningkatkan kegiatan pengiriman paket baik oleh perusahaan pos Indonesia maupun perusahaan swasta lainnya.

**Tabel 2.1**  
 Nilai Tambah Bruto, Pertumbuhan dan Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi Tahun 2016

Subsektor	Nilai Tambah Bruto (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	Peranan Thd Total PDRB (%)	Struktur Sektor Industri Pengolahan (%)
Informasi dan Komunikasi	333.112,77	8,75	4,63	100,00
Informasi dan Komunikasi	333.112,77	8,75	4,63	100,00

Sumber Data : PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus



berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sejalan dengan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga bagi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

### 2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SLIPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2017 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

#### **2. Prioritas**

Penggunaan anggaran tahun 2017 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2017 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru.

#### **3. Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

#### **4. Optimalisasi Belanja Langsung**

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2017 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

#### **5. Transparan dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

#### **6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan**

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

#### **7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2017 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2017.

#### **8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

9. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.

### 2.2.2 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana kinerja adalah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari rencana kinerja ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Rencana kinerja berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Target Kinerja Kominfo Kota Banjarbaru**

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		100%		<b>983.901.880</b>
	Tersedianya materai	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
	Tersedianya Pembayaran	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	103.104.000

	Listrik, Air, Telepon dan Internet		Air dan Listrik	
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.200.000
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.900
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.937.700
	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.105.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.230.000
	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	399.205.280
	Tersedianya Honorarium Jasa Non PNS		Penyediaan Jasa Non PNS	366.120.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				<b>1.105.402.525</b>
	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	44.800.000
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	166.729.075
	Tersedianya Meubeler Kantor	100%	Pengadaan Meubeler	216.920.000
	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.834.950
	Tersedianya BBM	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	41.730.500
	Tersedianya Jasa Service	100%		
	Tersedianya Suku Cadang	100%		
	Tersedianya Perpanjangan SNTK/BPKB	100%		

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Tersedianya BBM	100%	Pemeliharaan	74.998.000

			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
	Tersedianya Perawatan AC	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.630.000
	Tersedianya TV	100%		
	Tersedianya Perawatan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.800.000
	Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	342.590.000
	Tersedianya Gedung Kantor	100%	Pembangunan Gedung Kantor	70.900.000
	Tersedianya Taman Kantor	100%	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	86.470.000
	Penambahan Daya Listrik	100%		
Program Peningkatan Displin Aparatur		100%		<b>18.359.955</b>
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	18.359.955
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		<b>105.000.000</b>
	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	100%	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	105.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		<b>28.639.900</b>
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	22.579.900
	Tersedianya Laporan Inventaris Barang/Aset	100%	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	6.060.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media				<b>1.571.614.900</b>

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5

	Tercapainya Pelaksanaan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Seluruh Wiayah Kota Banjarbaru	100%	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.408.670.000
	Terbinanya dan terawasinya sarana dan prasarana TI	100%	Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	162.944.900
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				5.110.436.500
	Penyediaan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	100%	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	4.274.694.000
	terlaksananya pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	100%	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasaran Teknologi Informasi	15.000.000
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	690.318.500
	Honor Tim E-Govt, Redesign Website, Dedicated server dan SSL, ATK, makan minum rapat	12 bulan	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	101.529.000
	ATK, fotocopy, makan minum	12 bulan	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	5.310.000
	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Persandian	100%	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	7.655.000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persandian	100%	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Persandian	15.930.000
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		100%		300.000.000

Program	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5

	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan Tata Kelola Jaringan Komunikasi dan Informasi	100%	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	300.000.000
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		100%		20.000.000
	Meningkatnya kemampuan TIK SDM di lingkup Diskominfo	100%	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	20.000.000
Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah		100%		221.438.500
	Buku Statistik Kota Banjarbaru	100%	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	77.956.000
	Buku Indikator Makro	100%	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	62.282.500
	Video Profil, Buku dan Leflet	100%	Penyusunan Profil Daerah	81.200.000
Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi publik		100%		32.125.000
	Terfasilitasinya Tim LAPOR! Kota Banjarbaru	100%	Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	23.375.000
	Terlaksananya pembentukan pojok PPID	100%	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	8.750.000
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		100%		14.997.500
	Terbentuknya KIM	100%	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	14.997.500
TOTAL				9,511,916,660

**Tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru**



NO KODE REKENING				URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	PERSEN (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 983,901,880</b>	<b>Rp 801,438,960</b>	<b>81.46%</b>
				Kegiatan :			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	100.00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 103,104,000	Rp 71,112,385	68.97%
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	100.00%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000	Rp 13,781,500	91.88%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21,999,900	Rp 21,763,000	98.92%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6,937,700	Rp 6,797,200	97.97%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 6,105,000	Rp 6,090,000	99.75%
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 55,230,000	Rp 54,635,000	98.92%
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 399,205,280	Rp 398,509,875	99.83%
				Penyediaan Jasa Non PNS	Rp 366,120,000	Rp 218,550,000	59.69%
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 1,105,402,525</b>	<b>Rp 990,862,415</b>	<b>89.64%</b>
				Kegiatan :			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 44,800,000	Rp 42,433,000	94.72%
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 166,729,075	Rp 156,162,925	93.66%
				Pengadaan Meubeler	Rp 216,920,000	Rp 214,810,000	99.03%
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 44,834,950	Rp 29,165,996	65.05%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 41,730,500	Rp 30,992,500	74.27%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 74,998,000	Rp 8,657,994	11.54%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 4,630,000	Rp 4,630,000	100.00%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 10,800,000	Rp 6,900,000	63.89%
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 342,590,000	Rp 340,990,000	99.53%
				Pembangunan Gedung Kantor	Rp 70,900,000	Rp 69,650,000	98.24%
				pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000	Rp 86,470,000	100.00%
				<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>Rp 18,359,955</b>	<b>Rp 18,350,000</b>	<b>99.95%</b>
				Kegiatan :			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	99.95%
				<b>Proghram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 105,000,000</b>	<b>Rp 80,880,000</b>	<b>77.03%</b>
				Kegiatan :			
				Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	77.03%
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 28,639,900</b>	<b>Rp 27,392,600</b>	<b>95.64%</b>
				Kegiatan :			
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp 22,579,900	Rp 21,842,600	96.73%
				Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Rp 6,060,000	Rp 5,550,000	91.58%
				<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media</b>	<b>Rp 1,571,614,900</b>	<b>Rp 1,556,502,261</b>	<b>99.04%</b>

NO KODE REKENING				URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	PERSEN (%)

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>Kegiatan :</b>			
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 1,408,670,000	Rp 1,407,909,600	99.95%
				Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Rp 162,944,900	Rp 148,592,661	91.19%
				<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Rp 5,110,436,500</b>	<b>Rp 4,339,137,123</b>	<b>84.91%</b>
				Kegiatan :			
				Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Rp 4,274,694,000	Rp 3,575,452,728	83.64%
				2. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasaran Teknologi Informasi	Rp 15,000,000	Rp 6,900,000	46.00%
				Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 690,318,500	Rp 647,894,397	93.85%
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 101,529,000	Rp 86,341,000	85.04%
				Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Rp 5,310,000	Rp 5,296,000	99.74%
				Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	Rp 7,655,000	Rp 3,755,000	49.05%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Persandian	Rp 15,930,000	Rp 13,497,998	84.73%
				<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Rp 300,000,000</b>	<b>Rp 266,039,000</b>	<b>88.68%</b>
				Kegiatan :			
				Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	88.68%
				<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Rp 20,000,000</b>	<b>Rp 10,940,000</b>	<b>54.70%</b>
				Kegiatan :			
				Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	54.70%
				<b>Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah</b>	<b>Rp 221,438,500</b>	<b>Rp 217,471,500</b>	<b>98.21%</b>
				Kegiatan :			
				Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Rp 77,956,000	Rp 76,489,000	98.12%
				Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 62,282,500	Rp 60,117,500	96.52%
				Penyusunan Profil Daerah	Rp 81,200,000	Rp 80,865,000	99.59%
				<b>Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi publik</b>	<b>Rp 32,125,000</b>	<b>Rp 32,125,000</b>	<b>100.00%</b>
				Kegiatan :			
				Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 23,375,000	Rp 23,375,000	100.00%
				Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Rp 8,750,000	Rp 8,750,000	100.00%
				<b>Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 14,997,500</b>	<b>Rp 14,159,000</b>	<b>94.41%</b>
				Kegiatan :			
				Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	94.41%
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 9,511,916,660</b>	<b>Rp 8,355,297,859</b>	<b>87.84%</b>

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 mendapat dukungan dana sebesar **Rp 12.563.937.660**, yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.052.021.000	2.630.691.431	86,19%
2	BELANJA LANGSUNG ;	9.511.916.660	8.379.586.179	88.09%
	<b>APBD</b>	<b>12.563.937.660</b>	<b>11.010.277.610</b>	<b>87.63%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.563.937.660</b>	<b>11.010.277.610</b>	<b>87.63%</b>

Realisasi penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru hingga akhir Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar **Rp. 11.010.277.610** atau terealisasi sebesar **87,63%**, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar **Rp.1.553.660.050** atau **12.37%**.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 2.630.691.431** atau **20.94%** dari total anggaran.
- Belanja Langsung sebesar Rp. 8.379.586.179** atau **66,70%** dari total anggaran, yang terdiri dari :
  - Belanja Pegawai sebesar Rp. 237.525.000** atau **1,89%** dari total anggaran .
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.014.857.250** atau **31,95 %** dari total anggaran dan **Belanja Modal sebesar Rp. 4.127.203.929** atau **5,21%** dari total anggaran.

Adapun rinciannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
<b>Non Program</b>	Rp 3,052,021,000	Rp 2,630,691,431	Rp 421,329,569	86.20%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 983,901,880</b>	<b>Rp 801,375,960</b>	<b>Rp 182,525,920</b>	<b>81.45%</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -	100.00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 103,104,000	Rp 71,112,385	Rp 31,991,615	68.97%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	Rp -	100.00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000	Rp 13,718,500	Rp 1,281,500	91.46%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 21,999,900	Rp 21,763,000	Rp 236,900	98.92%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 6,937,700	Rp 6,797,200	Rp 140,500	97.97%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,105,000	Rp 6,090,000	Rp 15,000	99.75%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55,230,000	Rp 54,635,000	Rp 595,000	98.92%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 399,205,280	Rp 398,509,875	Rp 695,405	99.83%
Penyediaan jasa non PNS	Rp 366,120,000	Rp 218,550,000	Rp 147,570,000	59.69%
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Rp 1,105,402,525</b>	<b>Rp 1,005,538,735</b>	<b>Rp 99,863,790</b>	<b>90.97%</b>
Pembangunan gedung kantor	Rp 70,900,000	Rp 69,650,000	Rp 1,250,000	98.24%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 44,800,000	Rp 42,433,000	Rp 2,367,000	94.72%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 166,729,075	Rp 156,162,925	Rp 10,566,150	93.66%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 44,834,950	Rp 39,942,316	Rp 4,892,634	89.09%
Pengadaan mebeleur	Rp 216,920,000	Rp 214,810,000	Rp 2,110,000	99.03%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000	Rp 86,470,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 41,730,500	Rp 30,992,500	Rp 10,738,000	74.27%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 74,998,000	Rp 8,657,994	Rp 66,340,006	11.54%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 4,630,000	Rp 4,630,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp -	100.00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 342,590,000	Rp 340,990,000	Rp 1,600,000	99.53%
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Rp 123,359,955</b>	<b>Rp 99,230,000</b>	<b>Rp 24,129,955</b>	<b>80.44%</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	Rp 9,955	99.95%
Pendidikan dan Pelatihan non formal	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	Rp 24,120,000	77.03%
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp 28,639,900</b>	<b>Rp 27,392,600</b>	<b>Rp 1,247,300</b>	<b>95.64%</b>
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 22,579,900	Rp 21,842,600	Rp 737,300	96.73%
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 6,060,000	Rp 5,550,000	Rp 510,000	91.58%
<b>Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	<b>Rp 5,110,436,500</b>	<b>Rp 4,342,617,123</b>	<b>Rp 767,819,377</b>	<b>84.98%</b>
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Rp 4,274,694,000	Rp 3,575,452,728	Rp 699,241,272	83.64%
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp 101,529,000	Rp 86,341,000	Rp 15,188,000	85.04%
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp 5,310,000	Rp 5,296,000	Rp 14,000	99.74%
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 15,000,000	Rp 6,900,000	Rp 8,100,000	46.00%
pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian	Rp 15,930,000	Rp 13,497,998	Rp 2,432,002	84.73%

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 7,655,000	Rp 7,235,000	Rp 420,000	94.51%
penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	Rp 690,318,500	Rp 647,894,397	Rp 42,424,103	93.85%
<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	<b>Rp 300,000,000</b>	<b>Rp 266,039,000</b>	<b>Rp 33,961,000</b>	<b>88.68%</b>
pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	Rp 33,961,000	88.68%
<b>Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Rp 20,000,000</b>	<b>Rp 10,940,000</b>	<b>Rp 9,060,000</b>	<b>54.70%</b>
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	Rp 9,060,000	54.70%
<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	<b>Rp 1,571,614,900</b>	<b>Rp 1,556,502,261</b>	<b>Rp 15,112,639</b>	<b>99.04%</b>
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 1,408,670,000	Rp 1,407,909,600	Rp 760,400	99.95%
pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 162,944,900	Rp 148,592,661	Rp 14,352,239	91.19%
<b>program peningkatan akses dan kualitas informasi public</b>	<b>Rp 32,125,000</b>	<b>Rp 32,125,000</b>	<b>Rp -</b>	<b>100.00%</b>
pemantauan isu publik pendapat umum dan aduan masyarakat	Rp 23,375,000	Rp 23,375,000	Rp -	100.00%
pelayanan permintaan informasi publik	Rp 8,750,000	Rp 8,750,000	Rp -	100.00%
<b>program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah</b>	<b>Rp 14,997,500</b>	<b>Rp 14,159,000</b>	<b>Rp 838,500</b>	<b>94.41%</b>
fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi public	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	Rp 838,500	94.41%
<b>program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Rp 221,438,500</b>	<b>Rp 217,471,500</b>	<b>Rp 3,967,000</b>	<b>98.21%</b>
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 77,956,000	Rp 76,489,000	Rp 1,467,000	98.12%
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 62,282,500	Rp 60,117,500	Rp 2,165,000	96.52%
penyusunan profil daerah	Rp 81,200,000	Rp 80,865,000	Rp 335,000	99.59%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 12,563,937,660</b>	<b>Rp 11,004,082,610</b>	<b>Rp 1,559,855,050</b>	<b>87.58%</b>

Cat : Selisih realisasi sebesar Rp.6.195.000,- disebabkan kesalahan dalam perhitungan pengembalian sisa UP. Dan jumlah tsb sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Januari 2018 (bukti setoran terlampir)

### 3.2 Hambatan dan Kendala Penyerapan Anggaran Dikaitkan dengan Pencapaian Kinerja yang Telah Ditetapkan

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru di tahun 2017 yang tidak terserap adalah sebesar 12,37% atau Rp. 1.553.660.050. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

#### 1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran terdapat pada beberapa kegiatan, seperti :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, bahan bakar minyak/gas) yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, Surat Kabar/majalah, jasa penelitian, jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur) disesuaikan dengan

tagihan/kebutuhan.

- c. Penyediaan jasa non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2017 disesuaikan dengan keperluan tiap Bidang dan tujuan yang ingin dicapai.
- d. Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional .  
Karena kendaraan dinas yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru kondisinya masih dalam keadaan baik, dan beberapa kendaraan diterima di akhir tahun, maka anggaran pemeliharaan rutin berkala untuk kendaraan dinas/operasional tidak banyak yang dikeluarkan dan hal ini juga merupakan efisiensi terhadap anggaran yang ada.
- e. Belanja jasa konsultasi perencanaan,  
Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 16,36%. Nilai efisiensi didapat karena penawaran dari pemenang tender untuk pemasangan Fiber Optic turun 15,30% atau setara dengan Rp. 487.401.600 dari nilai PAGU. Hal ini juga berlaku pada pembuatan Master Plan.
- f. Penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang di tahun 2017 juga memberi banyak keuntungan, seperti harga yang lebih murah dibanding harga pasaran, terbuka serta proses yang lebih mudah. Hal ini juga memberi nilai efisiensi terhadap anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 2. Kendala/Hambatan

- a. Pada kegiatan **pendidikan dan pelatihan non formal**, dari PAGU Rp. 105.000.000,- yang terserap adalah Rp. 80.880.000,- atau 77,03%. Hal ini disebabkan karena kurangnya referensi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.

### **Solusi :**

Memperbanyak referensi tentang pendidikan dan pelatihan non formal yang sesuai dengan kebutuhan pegawai serta membuat jadwal pelaksanaannya.

- b. Pada kegiatan **pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**, Tim e-Government yang direncanakan akan dibentuk kembali di tahun 2017, tidak terealisasi. Hal ini disebabkan, karena hampir semua anggota Tim e-Government yang terbentuk pada tahun 2016 (sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika

berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru), merupakan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, sehingga di tahun 2017 pembentukan Tim e-Government dirasa tidak perlu lagi.

- c. Pada kegiatan **monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi**, penyerapan anggaran 46%. Hal ini disebabkan karena kewenangan telekomunikasi tidak lagi berada di Dinas Komunikasi dan Informasi pada pertengahan tahun anggaran.
- d. Pada kegiatan yang mendukung seksi persandian, yaitu **pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian serta perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian** secara keseluruhan penyerapan anggaran diatas 80%. Namun, pada praktiknya untuk menerapkan persandian sebagai pengamanan informasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sulit dilakukan. Solusi yang ditawarkan adalah memperbanyak referensi terkait kegiatan persandian, serta memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, karena paradigma persandian saat ini sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.
- e. Kegiatan **Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi** merupakan kegiatan baru menggunakan anggaran perubahan. Dari 3 pelatihan yang telah dianggarkan, hanya 2 pelatihan yang terealisasi karena keterbatasan waktu.

**Solusi :**

Kegiatan pelatihan SDM sebaiknya tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni.

- f. **Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**  
secara keseluruhan penyerapan anggaran pada program ini diatas 95%. Kendala ada pada pelaksanaan di lapangan, yaitu keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengumpulan data statistik. Saat ini pengelolaan dan pengumpulan data statistik dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pembina (BPS Kota Banjarbaru).

Namun hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang menjadi sangat tergantung pada instansi pembina.

**Solusi :**

Menambah kualitas dan kuantitas SDM dibidang statistik.



## BAB IV

# KEBIJAKAN AKUNTANSI



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 29 November 2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

### 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

##### **4.3.1 Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

##### **1) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

## 2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

### 4.3.2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

#### 1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

#### 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### 4.3.3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

#### 4.3.4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan

#### 4.3.5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, serta potongan pajak yang belum disetorkan hingga tanggal neraca. Saldo simpanan di bank yang termasuk dalam kategori kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo dibawah 3 (tiga) bulan yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

#### 4.3.6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

##### 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

## 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

## 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR.

Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

#### 4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### 5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);

- d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.



Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
  - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
  - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
  - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
  - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

#### 4.3.7. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan



berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan  
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### 4.3.8. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### 4.3.9. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### 4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

#### 4.3.11. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### 4.3.12. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
  - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
  - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 4.3.13. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
  - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### 4.3.14. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh

Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### 4.3.15. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

##### Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

## 2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

### 4.3.16. Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



BAB V

PENJELASAN

POS-POS LAPORAN

KEUANGAN



5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.1.2 Belanja

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
11.010.277.610,00	0,00

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	7.781.758.635,00	6.883.073.681,00	88.45	0,00
2	Belanja Modal	4.782.179.025,00	4.127.203.929,00	86.30	0,00
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.563.937.660,00	11.010.277,610,00	87,63	0,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
7.781.758.635	0,00

**Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3. 092.971.000	2. 658.066.431	85,94
2	Belanja Barang dan Jasa	4.688.787.635	4.225.007.250	90,11
3	Hibah	0,00	0,00	
4	Bantuan Sosial	0,00	0,00	
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.781.758.635</b>	<b>6.883.073.681</b>	<b>88.45</b>

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.988.821.000	1.805.164.159	90.77
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.063.200.000	825.527.272	77.65
3	Honorarium PNS	40.950.000	27.375.000	66.85
<b>TOTAL</b>		<b>3.092.971.000</b>	<b>2.658.066.431</b>	<b>85.94</b>

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	143.774.000,00	89.805.494,00	62.46
2	Belanja Jasa Kantor	2.479.456.000,00	2.391.702.581,00	96.46
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.658.500,00	14.164.700,00	34.84
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.823.900,00	122.026.600,00	98.55
5	Belanja Makanan dan Minuman	154.380.000,00	146.441.000,00	94.86
6	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.359.955,00	18.350.000,00	99.95
7	Belanja Perjalanan Dinas	411.185.280,00	400.884.875,00	97.49
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	105.000.000,00	80.880.000,00	77.03
9	Belanja Pemeliharaan	557.430.000,00	487.537.000,00	87.46
10	Belanja Jasa Konsultasi	297.000.000,00	263.065.000,00	88.57
11	Belanja Honorarium non PNS	357.720.000,00	210.150.000,00	58,75
<b>TOTAL</b>		<b>4.688.787.635,00</b>	<b>4.225.007.250,00</b>	<b>90,11</b>

#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

**Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

**Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

**Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

**31 Desember 2017**

**(Rp)**

**4.127.203.929,00**

**31 Desember 2016**

**(Rp)**

**0,00**

**Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	44.800.000,00	42.433.000,00	94.72
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	166.370.000,00	156.953.850,00	94.34
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga	250.779.075,00	244.619.075,00	97.54
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	3.993.679.950,00	3.374.635.004,00	84.50
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio	94.580.000,00	79.350.000,00	83.90
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi	25.350.000,00	24.816.000,00	97.89
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Pemancar	47.450.000,00	46.477.000,00	97.95
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.350.000,00	90.100.000,00	98.63
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik	66.020.000,00	66.020.000,00	100
10	Belanja Modal Aset Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100
<b>TOTAL</b>		<b>4.782.179.025,00</b>	<b>4.127.203.929,00</b>	<b>86.30</b>

#### 5.1.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.800.000,00	42.433.000,00	94.72
2	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.250.000,00	20.750.000,00	97.65
3	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	145.120.000,00	136.203.850,00	93.86
4	Pengadaan Meubelair	216.920.000,00	214.810.000,00	99.03
5	Pengadaan Alat Pendingin	22.500.000,00	18.450.000,00	82.00
6	Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
7	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.359.075,00	10.359.075,00	100
8	Pengadaan Personal Komputer	188.910.000,00	170.141.612,00	90.06
9	Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	375.544.950,00	292.968.649,00	78.01
10	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	114.200.000,00	105.201.343,00	92.12
11	Pengadaan Peralatan Jaringan	3.315.025.000,00	2.806.323.400,00	84.65
12	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	94.580.000,00	79.350.000,00	83.90
13	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	3.500.000,00	100
14	Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	9.400.000,00	8.920.000,00	94.89
15	Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	12.450.000,00	12.396.000,00	99.57
16	Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	35.000.000,00	34.980.000,00	99.94
17	Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	12.450.000,00	11.497.000,00	92.35
TOTAL		4.623.009.025,00	3.969.283.929	85.86

5.1.2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.350.000	90.100.000	98.63
TOTAL		91.350.000	90.100.000	98.63

5.1.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Jaringan Distribusi	66.020.000	66.020.000	100
TOTAL		66.020.000	66.020.000	100

#### 5.1.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

#### 5.1.2.2.5 Belanja Aset Lainnya

Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain			
TOTAL		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

#### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

##### Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
(11.010.277.610,00)	0,00

#### 5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	12.563.937.660,00	11.010.277.610,00	87,63	0,00
Surplus/Defisit		(12.563.937.660,00)	(11.010.277.610,00)	87,63	0,00

### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

**Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

**Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Penyertaan Modal pada Bank	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

**31 Desember 2017**

**31 Desember 2016**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(11.010.277.610)**

**0,00**

**Tabel 5.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	12.563.937.660,00	11.010.277.610,00	87,63	0,00
3	Surplus (Defisit)	(12.563.937.660,00)	(11.010.277.610,00)	87,63	0,00
4	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SILPA</b>		<b>(12.563.937.660,00)</b>	<b>(11.010.277.610,00)</b>	<b>87,63</b>	<b>0,00</b>

## 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

### 5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

### 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00



### 5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016. Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 4.165.399.224,83 dan Rp 0,00.

Posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2016 adalah 0,00 karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SKPD baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Penjelasan pos-pos neraca adalah sbb :

#### 5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>6.813.000,00</u>	<u>0,00</u>

##### 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

##### 5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>6.195.000,00</u>	<u>0,00</u>

##### 5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

##### 5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

#### 5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.6 Kas Lain-lain

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.8 Piutang Pajak

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.9 Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.10 Piutang Retribusi

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.11 Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.12 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.13 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.14 Piutang Bagi Hasil Provinsi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.16 Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.1.17 Persediaan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
(Rp)	(Rp)
618.000,00	0,00

### 5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

### 5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
4.157.146.224,83	0,00

**Tabel 5.18 Komponen Aset tetap Tahun 2017**

Komponen Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2016
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.670.656.108,16	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.020.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	424.980.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Ak. Penyusutan	(2.004.509.883,33)	0,00
<b>Aset Tetap</b>	<b>4.157.146.224,83</b>	<b>0,00</b>

**Tabel 5.19 Perbandingan Aset Tetap Tahun 2017 dan 2016**

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	0,00	0,00		
Peralatan dan Mesin	0,00	5.670.656.108,16		
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	66.020.000,00		
Aset Tetap Lainnya	0,00	424.980.000,00		
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00		
Ak. Penyusutan	0,00	(2.004.509.883,33)		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.146.22,83</b>		

#### 5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2017  
(Rp)  
**0,00**

31 Desember 2016  
(Rp)  
**0,00**

#### 5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2017  
(Rp)  
**5.670.656.108,16**

31 Desember 2016  
(Rp)  
**0,00**

**Tabel 5.21 Rincian Peralatan dan Mesin**

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1	Mutasi Tambah Karena Perubahan SKPD	1.415.430.512,39
2	Belanja Modal 2017	3.969.283.929,00
3	Mutasi Tambah Antar SKPD	418.072.450,00
4	Non Aset 2017	(11.298.000,00)
5	Ekstra 2017	(69.922.783,23)
6	Reklas Antar KIB	(50.910.000,00)
TOTAL		5.670.656.108,16

**A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp 4.387.356.379,00**

**a. Penambahan Aset karena Perubahan SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.415.430.512,39**

**Tabel 5.23 Penambahan Aset Karena Perubahan SKPD Tahun 2017**

No	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
1.	Sepeda Motor	2007	1	9.600.000,00	9.600.000,00
2.	Sepeda Motor	2007	1	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Sepeda Motor	2013	1	19.577.850,00	19.577.850,00
4.	Global Positioning System (GPS)	2010	1	5.570.000,00	5.570.000,00
5	Global Positioning System (GPS)	2013	1	3.250.000,00	3.250.000,00
6	AC Split	2009	1	4.500.000,00	4.500.000,00
7	AC Split	2011	1	2.850.000,00	2.850.000,00
8	AC Split	2012	1	3.025.000,00	3.025.000,00
9	AC Split	2013	1	4.500.000,00	4.500.000,00
10	AC Split	2014	1	4.500.000,00	4.500.000,00
11	AC Split	2014	1	7.500.000,00	7.500.000,00
12	AC Split	2014	1	6.000.000,00	6.000.000,00
13	AC Split	2014	1	3.450.000,00	3.450.000,00
14	Kipas Angin	2014	1	1.500.000,00	1.500.000,00
15	Camera Video	2013	1	1.525.000,00	1.525.000,00
16	Alat Pemadam Portable	2005		1.400.000,00	1.400.000,00
17	Note Book	2010	1	4.900.000,00	4.900.000,00
18	Scanner	2008	1	1.248.700,00	1.248.700,00
19	Peralatan Jaringan Lain-lain	2008	1	34.900.000,00	34.900.000,00
20	Peralatan Jaringan Lain-lain	2009	1	6.080.400,00	6.080.400,00
21	Peralatan Jaringan Lain-lain	2011	1	14.000.000,00	14.000.000,00
22	Peralatan Jaringan Lain-lain	2012	1	4.400.000,00	4.400.000,00
23	Peralatan Jaringan Lain-lain	2012	1	2.800.000,00	2.800.000,00
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	2012	1	3.080.000,00	3.080.000,00
25	Peralatan Jaringan Lain-lain	2012	1	1.250.000,00	1.250.000,00
26	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1	1.400.000,00	1.400.000,00
27	Lensa Kamera	2010	1	9.700.000,00	9.700.000,00
28	Gordyn	2015	1	8.000.000,00	8.000.000,00
29	AC Split	2015	1	4.500.000,00	4.500.000,00
30	AC Split	2015	1	6.450.000,00	6.450.000,00
31	AC Split	2015	1	4.500.000,00	4.500.000,00
32	AC Split	2015	1	4.500.000,00	4.500.000,00
33	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2015	1	2.700.000,00	2.700.000,00
34	UPS	2015	1	15.400.000,00	15.400.000,00
35	Router	2015	1	14.900.000,00	14.900.000,00
36	Peralatan Jaringan Lain-lain	2015	1	49.800.000,00	49.800.000,00
37	Peralatan Jaringan Lain-lain	2015	1	28.500.000,00	28.500.000,00
38	Radio Access Point	2015	1	11.800.000,00	11.800.000,00
39	Antene	2015	1	10.000.000,00	10.000.000,00
40	Antene	2015	1	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Switch Hub	2015	1	29.500.000,00	29.500.000,00

42	Peralatan studio Visual Lain-lain	2015	1	20.750.000,00	20.750.000,00
43	Kabel Listril	2015	1	2.500.000,00	2.500.000,00
44	CCTV	2015	1	14.420.000,00	14.420.000,00
45	CCTV	2015	1	88.000.000,00	88.000.000,00
46	Global Positioning System (GPS)	2016	1	9.500.000,00	9.500.000,00
47	Sofa	2016	1	8.722.384,00	8.722.384,00
48	AC Split	2016	1	6.000.000,00	6.000.000,00
49	Televisi	2016	1	7.000.000,00	7.000.000,00
50	Camera Video	2016	1	7.400.000,00	7.400.000,00
51	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2016	1	19.900.000,00	19.900.000,00
52	Server	2016	1	50.350.000,00	50.350.000,00
53	Audio Cassete Recorder	2016	1	2.200.000,00	2.200.000,00
54	Printer	2016	1	3.000.000,00	3.000.000,00
55	CCTV	2016	1	90.495.000,00	90.495.000,00
56	Peralatan Listrik	2014	1	8.750.000,00	8.750.000,00
57	Tool Kit Boks	2014	1	2.000.000,00	2.000.000,00
58	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
59	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
60	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
61	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
62	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
63	Meja Rapat	2011	1	3.300.000,00	3.300.000,00
64	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
65	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
66	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
67	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
68	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
69	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
70	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
71	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
72	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
73	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
74	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
75	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
76	Kursi Rapat	2011	1	1.929.642,00	1.929.642,00
77	Kursi Rapat	2011	1	1.929.654,00	1.929.654,00
78	AC Split	2011	1	3.525.000,00	3.525.000,00
79	AC Split	2011	1	3.525.000,00	3.525.000,00
80	Camera Film	2012	1	3.000.000,00	3.000.000,00
81	P.C Unit/ Komputer PC	2010	1	8.425.000,00	8.425.000,00
82	P.C Unit/ Komputer PC	2014	1	8.475.000,00	8.475.000,00
83	P.C Unit/ Komputer PC	2014	1	8.475.000,00	8.475.000,00
84	Lap Top	2009	1	8.250.000,00	8.250.000,00
85	Lap Top	2014	1	12.487.500,00	12.487.500,00
86	Printer	2012	1	1.466.666,00	1.466.666,00
87	Printer	2014	1	1.485.000,00	1.485.000,00
88	UPS	2009	1	19.808.000,00	19.808.000,00
89	UPS	2010	1	7.450.000,00	7.450.000,00
90	Harddisk Internal	2014	1	7.500.000,00	7.500.000,00
91	Harddisk Internal	2014	1	7.500.000,00	7.500.000,00
92	Harddisk Internal	2014	1	7.500.000,00	7.500.000,00
93	Harddisk Eksternal	2014	1	1.400.000,00	1.400.000,00
94	Memory	2014	1	3.750.000,00	3.750.000,00
95	Memory	2014	1	3.750.000,00	3.750.000,00

96	Memory	2014	1	3.750.000,00	3.750.000,00
97	Server	2010	1	25.050.000,00	25.050.000,00
98	Server	2012	1	50.200.000,00	50.200.000,00
99	Server	2014	1	85.000.000,00	85.000.000,00
100	Router	2009	1	4.955.000,00	4.955.000,00
101	Router	2013	1	8.800.000,00	8.800.000,00
102	Router	2014	1	25.000.000,00	25.000.000,00
103	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1	2.090.000,00	2.090.000,00
104	Switch Hub	2009	1	1.242.000,00	1.242.000,00
105	Switch Hub	2014	1	5.000.000,00	5.000.000,00
106	Switch Hub	2014	1	5.000.000,00	5.000.000,00
107	Wireless Access Point	2013	1	1.929.125,00	1.929.125,00
108	Wireless Access Point	2013	1	1.929.125,00	1.929.125,00
109	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2011	1	4.000.000,00	4.000.000,00
110	Clearing Instalation	2014	1	10.600.000,00	10.600.000,00
111	Televisi	2015	4	4.359.626,73	17.438.506,92
112	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
113	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
114	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
115	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
116	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
117	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
118	P.C Unit/ Komputer PC	2015	1	6.776.736,24	6.776.736,24
119	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
120	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
121	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
122	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
123	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
124	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
125	UPS	2015	1	2.538.516,83	2.538.516,83
126	Server	2015	1	57.944.405,94	57.944.405,94
127	CCTV	2015	1	9.878.141,60	9.878.141,60
128	Alat Pengaman (Sinyal)	2016	1	5.711.488,01	5.711.488,01
129	Alat Pengaman (Sinyal)	2016	1	5.711.488,01	5.711.488,01
130	Meja Panjang	2016	1	41.921.212,94	41.921.212,94
131	Kursi Putar	2016	1	1.996.248,24	1.996.248,24
132	Kursi Putar	2016	1	1.996.248,24	1.996.248,24
133	Kursi Putar	2016	1	1.996.248,24	1.996.248,24
134	Loudspeaker	2016	1	7.097.771,51	7.097.771,51
135	Sound System	2016	1	7.541.382,23	7.541.382,23
136	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
137	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
138	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
139	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
140	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
141	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
142	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
143	P.C Unit/ Komputer PC	2016	1	8.450.000,00	8.450.000,00
144	UPS	2016	1	1.940.796,90	1.940.796,90
145	UPS	2016	1	1.940.796,90	1.940.796,90
146	UPS	2016	1	1.940.796,90	1.940.796,90
147	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
148	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
149	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
150	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
151	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00



152	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
153	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
154	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
155	UPS	2016	1	1.900.000,00	1.900.000,00
156	Stabilizer/Stavolt	2016	1	2.772.567,00	2.772.567,00
157	Power Supply Microphone	2016	1	7.097.771,51	7.097.771,51
158	Facsimile	2016	1	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.415.430.512,39</b>	<b>1.415.430.512,39</b>

Tabel 5.24 Penambahan Aset Karena Mutasi

No	Kode Barang	URAIAN	Mutasi Tambah Antar SKPD
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	6.600.000,00
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	7.800.000,00
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	7.800.000,00
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	9.000.000,00
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	13.800.000,00
6	02.03.01.01.03	Staion Wagon	159.299.950,00
7	02.03.01.01.03	Staion Wagon	213.772.500,00
<b>Total</b>			<b>418.072.450,00</b>

**a. Penambahan Aset Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp 3.969.283.929,00**

Tabel 5.25 Penambahan Aset Belanja Modal Tahun 2017

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
1	05.02.02.01.20	Toner Printer Laser	6.400.000,00
2	02.03.01.05.03	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	20.991.725,00
3	02.03.01.05.03	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	20.991.725,00
4	02.05.02.03.07	Alat Penyimpanan Lain-lain	7.459.350,00
5	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.700.000,00
6	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.700.000,00
7	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.700.000,00
8	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.450.000,00
9	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.450.000,00
10	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.450.000,00
11	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.450.000,00
12	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	2.850.000,00
13	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	7.500.000,00
14	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	14.950.000,00
15	02.06.02.01.17	Meja Reseption	3.225.731,38
16	02.06.02.01.18	Meja Tambahan	1.654.221,22
17	02.06.02.01.18	Meja Tambahan	1.654.221,22
18	02.06.02.01.20	Meja Bundar	2.150.487,58

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
19	02.06.02.01.20	Meja Bundar	2.150.487,58
20	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	1.040.154,25
21	02.06.02.04.03	AC Unit	4.300.000,00
22	02.06.02.04.13	Alat Pendingin Lain-lain	6.150.000,00
23	02.06.02.04.13	Alat Pendingin Lain-lain	12.300.000,00
24	02.06.02.06.02	Radio	5.950.000,00
25	02.06.02.06.03	Televisi	14.000.000,00
26	02.06.02.06.08	Sound System	7.444.500,00
27	02.06.02.06.12	Wireless	13.074.144,49
28	02.06.02.06.14	Microphone	2.011.406,84
29	02.06.02.06.22	Camera Film	8.534.373,00
30	02.06.02.06.22	Camera Film	8.534.373,00
31	02.06.02.06.37	Tangga Alumunium	3.000.000,00
32	02.06.02.06.51	Tandon Air	1.461.075,00
33	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	8.650.000,00
34	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	12.067.048,00
35	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	12.067.048,00
36	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	12.067.048,00
37	02.06.03.02.02	Lap Top	22.199.548,00
38	02.06.03.02.02	Lap Top	22.199.548,00
39	02.06.03.02.02	Lap Top	22.199.548,00
40	02.06.03.02.02	Lap Top	22.199.548,00
41	02.06.03.02.02	Lap Top	22.199.547,00
42	02.06.03.02.02	Lap Top	12.067.048,00
43	02.06.03.02.02	Lap Top	12.067.048,00
44	02.06.03.02.02	Lap Top	12.067.048,00
45	02.06.03.02.02	Lap Top	12.067.048,00
46	02.06.03.02.02	Lap Top	22.313.527,00
47	02.06.03.02.02	Lap Top	24.444.836,00
48	02.06.03.02.02	Lap Top	10.257.998,00
49	02.06.03.02.02	Lap Top	10.257.998,00
50	02.06.03.02.02	Lap Top	16.817.550,00
51	02.06.03.02.02	Lap Top	16.817.550,00
52	02.06.03.02.02	Lap Top	16.817.550,00
53	02.06.03.02.02	Lap Top	16.817.550,00
54	02.06.03.02.02	Lap Top	14.520.000,00
55	02.06.03.02.02	Lap Top	10.491.587,13
56	02.06.03.02.03	Note Book	15.758.801,00
57	02.06.03.02.03	Note Book	15.670.261,00
58	02.06.03.04.08	Printer	2.356.320,00
59	02.06.03.04.08	Printer	2.460.000,00
60	02.06.03.04.08	Printer	2.460.000,00
61	02.06.03.04.08	Printer	5.703.523,00
62	02.06.03.04.08	Printer	5.703.523,00
63	02.06.03.04.08	Printer	5.703.523,00
64	02.06.03.04.08	Printer	1.816.410,87
65	02.06.03.05.11	UPS	37.101.477,51

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
66	02.06.03.05.20	Memory	7.500.000,00
67	02.06.03.05.20	Memory	7.500.000,00
68	02.06.03.05.20	Memory	7.500.000,00
69	02.06.03.05.20	Memory	7.500.000,00
70	02.06.03.05.21	Power Supply	2.200.000,00
71	02.06.03.06.02	Router	19.145.248,00
72	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	15.840.000,00
73	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	12.100.000,00
74	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	8.250.000,00
75	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	6.600.000,00
76	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	4.798.200,00
77	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	2.705.913.400,00
78	02.06.03.06.10	Switch Hub	3.000.000,00
79	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	1.628.185,00
80	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	1.628.185,00
81	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	8.246.042,14
82	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29
83	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29
84	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29
85	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29
86	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
87	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
88	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
89	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
90	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
91	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
92	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
93	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
94	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15
95	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
96	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
97	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
98	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
99	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
100	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.430.834,46
101	02.06.04.01.10	Meja Kerja	4.245.834,46
102	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
103	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
104	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
105	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
106	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.210.834,46
107	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.595.834,46
108	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.595.834,46
109	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.595.834,46
110	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.595.834,46
111	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.078.834,46
112	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
113	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
114	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
115	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
116	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
117	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
118	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
119	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
120	02.06.04.01.10	Meja Kerja	2.760.834,46
121	02.06.04.01.10	Meja Kerja	1.660.834,46
122	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4.411.256,58
123	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44
124	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44
125	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44
126	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44
127	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
128	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
129	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
130	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
131	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
132	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
133	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
134	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
135	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
136	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	6.465.657,00
137	02.07.01.02.00	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	46.200.000,00
138	02.07.01.02.00	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	46.200.000,00
139	02.07.01.02.58	Film Projector	8.000.000,00
140	02.07.01.02.62	Camera Film	32.102.053,23
141	02.07.01.02.63	Lensa Kamera	9.290.000,00
142	02.07.01.03.22	Lighting Head Body	9.453.612,17
143	02.07.01.05.01	Alat Penyimpan Data	6.034.220,53
144	02.07.01.05.01	Alat Penyimpan Data	6.034.220,53
145	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	3.500.000,00
146	02.07.02.03.05	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00
147	02.07.02.03.05	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00
148	02.07.02.03.05	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00
149	02.07.02.03.05	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00
150	02.07.03.03.04	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	34.980.000,00
151	02.07.03.08.04	Stabilizer	2.497.000,00
152	02.09.01.15.28	Baterai	10.057.034,22
153	02.09.02.04.63	Ember Plastik	7.610.000,00
154	02.05.01.02.03	Garpu	150.000

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Modal 2017
155	02.05.01.08.27	Papan Nama Instansi	175.000
156	02.06.01.05.06	Papan Nama Ruangan/Jabatan	700.000
157	02.06.01.05.44	Kursi Kerja	1.400.000
158	02.06.02.01.66	Taplak Meja	52.557.675
159	02.06.02.01.76	Jam Elektronik	300.000
160	02.06.02.02.03	Kompas Gas	1.500.000
161	02.06.02.05.02	Dispenser	1.000.000
162	02.06.02.05.15	Radio	500.000
163	02.06.02.06.02	Alat Rumah Tangga Lain-lain	770.000
164	02.06.02.06.50	Selang Penyemprom Air	1.525.000
165	02.06.02.07.22	Peralatan Jaringan Lain-lain	168.000
166	02.06.03.06.06	Lighting Stand Tripod	1.911.800
167	02.07.01.02.57	Mangkok Porselin	583.308
168	02.09.01.61.01	Kabel Listril	1.200.000
169	02.09.02.03.08	Gelas minum	9.000.000
170	02.09.02.04.22	Pisau	1.250.000
171	02.09.02.04.77	Gelas Penutup	55.000
172	02.09.02.05.58	Buku Laporan Lain-lain	75.000
<b>Total</b>			<b>3.969.283.929,00</b>

**b. Pengurangan terhadap Aset Tetap Non Aset Tahun 2017 sebesar Rp.11.298.000,00**

**Tabel 5.26 Rincian Pengurangan terhadap Aset Tetap Non Aset Tahun 2017**

No	Kode Barang	URAIAN	Non Aset 2017
1	05.02.02.01.20	Toner Printer Laser	6.400.000,00
2	02.05.01.02.03	Ember Plastik	150.000,00
3	02.05.01.08.27	Garpu	175.000,00
4	02.06.01.05.06	Taplak Meja	300.000,00
5	02.06.01.05.44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.525.000,00
6	02.06.02.01.66	Selang Penyemprom Air	168.000,00
7	02.06.02.01.76	Mangkok Porselin	1.200.000,00
8	02.06.02.02.03	Gelas minum	1.250.000,00
9	02.06.02.05.02	Pisau	55.000,00
10	02.06.02.05.15	Gelas Penutup	75.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.298.000,00</b>

**c. Pengurangan terhadap Aset Tetap Ekstra Tahun 2017 sebesar Rp.69.922.783,23**

**Tabel 5.27 Rincian Pengurangan Terhadap Aset Tetap Ekstra Tahun 2017**

No	Kode Barang	URAIAN	Ekstra 2017
1	02.06.01.05.06	Papan Nama Instansi	700.000,00
2	02.06.01.05.44	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1.400.000,00
3	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	52.557.675,25
4	02.06.02.02.03	Jam Elektronik	1.500.000,00
5	02.06.02.05.02	Kompor Gas	1.000.000,00
6	02.06.02.05.15	Dispenser	500.000,00
7	02.06.02.06.02	Radio	770.000,00
8	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.911.800,00
9	02.07.01.02.57	Lighting Stand Tripod	583.307,98
10	02.09.02.03.08	Kabel Listrik	9.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.922.783,23</b>

**d. Pengurangan terhadap Aset Tetap Mutasi Kurang Reklas Antar KIB Tahun 2017 sebesar Rp.50.910.000,00 dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya**

**Tabel 5.28 Pengurangan terhadap Aset Tetap Mutasi Kurang Reklas Antar KIB Tahun 2017**

No	Kode Barang	URAIAN	Reklas Antar KIB 2017
1	05.17.02.02.06	Buku Laporan Lain-lain	50.910.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.910.000,00</b>

**5.3.3.3. Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2017	
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
4	Saldo Awal 2017	
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2017	90,100,000.00
	b. Retensi 5%	
	c. Belanja Pegawai 2017	
	d. Belanja Barang Jasa 2017	
	e. BOP/BOS/BOM	
	f. Hibah	
	g. Penambahan KDP	
	h. Mutasi Tambah	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>90,100,000.00</b>
6	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	
	b. Non Aset	
	c. Ekstra	20,450,000.00
	d. Penghapusan	
	e. Pengembalian Dana	
	f. Reklas ke KIB E	69,650,000.00
	g. Mutasi Kurang	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>90,100,000.00</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2017</b>	
	<b>Saldo Per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>

#### 5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>66.020.000,00</u>	<u>0,00</u>



No	Uraian	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo awal 2017</b>	
	a. Koreksi Kurang	
	b. Koreksi Tambah	
<b>2</b>	<b>Saldo setelah koreksi</b>	
<b>3</b>	<b>Penambahan :</b>	
	a. Belanja Modal 2017	66,020,000.00
	b. Retensi 5%	
	c. BOP/BOS/BOM	
	d. Mutasi Tambah	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>66,020,000.00</b>
<b>4</b>	<b>Pengurangan</b>	
	a. KDP	
	b. Non Aset	
	c. Pengembalian Dana	
	d. Mutasi Kurang	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Saldo Akhir 2017</b>	<b>66,020,000.00</b>

#### 5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

**31 Desember 2016**  
**(Rp)**  
**424.980.000,00**

**31 Desember 2015**  
**(Rp)**  
**0,00**

	Uraian	Nilai (Rp)
	<b>Saldo Akhir 2017</b>	
	a. Koreksi Tambah	
	<b>Saldo Awal 2017</b>	
	<b>Penambahan :</b>	
	a. Belanja Modal 2017	
	b. Belanja Barang Jasa 2017	304,420,000.00
	c. BOP/BOS/BOM	
	d. Hibah	
	e. Mutasi Tambah	
	f. Reklas Antar KIB	120,560,000.00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>424,980,000.00</b>
	<b>Pengurangan :</b>	
	a. Ekstra	
	b. Penghapusan	
	c. Mutasi Kurang	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>-</b>
	<b>Total Penambahan Tahun 2017</b>	<b>424,980,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>424,980,000.00</b>



**A. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 Belanja Barang dan Jasa 2017 sebesar Rp 304.420.000,00**

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Aset Renovasi	104.910.000,00
2.	Aset Renovasi	199.510.000,00
Total		304.420.000,00

**B. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya, Reklas Antar KIB Tahun 2017 sebesar Rp 120.560.000,00**

NO.	URAIAN	NILAI ( Rp )
1	Buku Laporan Lain-lain	49.900.000,00
2	Buku Laporan Lain-lain	19.750.000,00
3	Buku Laporan Lain-lain	50.910.000,00
Total		120.560.000,00

**5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan**

<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2.004.509.883,33</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,991,061,550.00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,301,000.00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10,147,333.33
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2015		2,004,509,883.33

**5.3.4 Dana Cadangan**

<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.5 Aset Lainnya

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>1.440.000,00</u>	<u>0,00</u>

#### 5.3.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>

1	Saldo awal	-
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2017	-
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2017	1,800,000.00
	b. Belanja Barang jasa 2017	-
	c. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	-
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2017	
	Jumlah	1,800,000.00

#### 5.3.5.2. Penambahan nilai aset tak berwujud, Belanja Modal tahun 2017 sebesar Rp 1.800.000,00

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1	Perangkat Lunak	1.800.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.800.000,00</b>

#### 5.3.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>(360.000,00)</u>	<u>0,00</u>

### 5.3.6 Kewajiban

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
11.022.119.902,00	0,00

No	Uraian	31-Des-17	31-Des-16
1	Utang Beban	5.647.292,00	0,00
2			
3			
Jumlah		5.647.292,00	

#### 5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

#### 5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.6.3 Utang Bunga

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.3.2.6 Utang Belanja

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
5.647.292,00	0,00

No	Keterangan	31-Des-17
1	Utang Belanja Listrik	5.422.763,00
2	Utang Belanja Telepon	224.529,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.647.292,00</b>

#### 5.3.2.7 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<u>11.016.472.610,00</u>	<u>0,00</u>

## 5.4. Laporan Operasional

### 5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

### 5.4.2. Beban-LO

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
7.629.241.813,33	0,00

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	7.629.241.813,33	-	-
2	Beban Transfer	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-

#### 5.4.2.1. Beban Operasi

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
7.629.241.813,33	0,00

#### Rincian Beban Operasi

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pegawai	2.658.066.431,00	-	2.658.066.431,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.936.914.542,00	-	3.936.914.542,00
3	Beban Hibah		-	-
4	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.034.260.840,33	-	1.034.260.840,33
6	Beban Lain-lain	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7.629.241.813,33</b>	<b>-</b>	<b>7.629.241.813,33</b>

#### 5.4.2.2. Beban Pegawai

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
2.658.066.431,00	0,00

Beban Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.658.066.431,00. Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut :

No	Keterangan	Saldo Tahun 2016	Saldo tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	-	1.805.164.159,00		-
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	-	825.527.272,00		-
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-		-
4	Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-		-
5	Beban Penghasilan Lainnya	-	-		-
6	Beban Honorarium PNS	-	27.375.000,00		-
7	Beban Honorarium Non PNS	-			-
8	Beban Uang Lembur	-			-
9	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-			-
10	Beban Belanja Pegawai Operasional BLUD	-			-
		-	<b>2.658.066.431,00</b>		

#### 5.4.2.3. Beban Barang Dan Jasa

**31 Desember 2017**  
**(Rp)**  
**3.936.914.542,00**

**31 Desember 2016**  
**(Rp)**  
**-**

No	Keterangan	Saldo Tahun 2016	Saldo tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	-	100.485.494,00		-
2	Beban Bahan/Material	-			-
3	Beban Jasa Kantor	-	2.397.349.873,00		-
4	Beban Premi Asuransi	-			-
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	14.164.700,00		-
6	Beban Cetak dan Penggandaan	-	122.026.600,00		-
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-			-
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-			-
9	Beban Sewa Alat Berat	-			-
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-			-
11	Beban Makanan dan Minuman	-	146.441.000,00		-
13	Beban Pakaian Kerja	-			-
14	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	18.350.000,00		-
15	Beban Perjalanan Dinas	-	400.884.875,00		-
16	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-			-
17	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	80.880.000,00		-
18	Beban Pemeliharaan	-	183.117.000,00		-
19	Beban Jasa Konsultansi	-	263.065.000,00		-
20	Beban Honorarium Non PNS - LO		210.150.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>3.936.914.542,00</b>	<b>-</b>	

#### 5.4.2.4. Beban Hibah

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.4.2.6. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.034.260.840,33	0,00

No	SKPD	Total
1	Peralatan dan Mesin	1.020.452.507,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.301.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	10.147.333,33
5	Aset Tak Berwujud	360.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.034.260.840,33</b>

#### 5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

#### 5.4.2.8. Beban Pegawai BOS

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00



### 5.4.2.9 Beban Transfer

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
0,00	0,00

### 5.4.2.10. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
(7.629.241.813,33)	0,00

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	(15.258.483.626,66)	-	-
2	Beban Transfer		-	-
3	Defisit Non Operasional		-	-
Jumlah			-	

## 5.5. Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(7.629.241.813,33)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :</b>	
Koreksi Kurang Catat Kas	0,00
Koreksi Lebih Catat Kas	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00
Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00
Mutasi Kurang Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00
Koreksi Kurang Catat Nilai Persediaan 2017	0,00
Koreksi Lebih Catat Nilai Persediaan 2017	0,00
Akumulasi Extracompatable Menjadi Aset 2016	0,00
Akumulasi Aset Menjadi Extracompatable 2016	0,00
Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset 2016	0,00
Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016	0,00
Aset Menjadi Extracompatable 2016	0,00
Extracompatable Menjadi Aset 2016	0,00
Lebih Catat Aset 2016	0,00
Kurang Catat Aset 2016	0,00
Mutasi Kurang Aset Perubahan SKPD	0,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Perubahan SKPD	0,00
Mutasi Tambah Aset Perubahan SKPD	1.415.430.512,39
Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Perubahan SKPD	(735.770.164,43)
Mutasi Kurang Antar SKPD	0,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Kurang Antar SKPD	0,00
Mutasi Tambah Antar SKPD	418.072.450,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Tambah Antar SKPD	(234.838.878,57)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan 2016	0,00
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan 2016	0,00
Reklasifikasi Menjadi Extracompatable Tahun Berjalan	(90.372.783,23)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	0,00
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>(6.856.720.677,17)</b>

## BAB VI

# PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanggal 29 November 2017, terbit Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan SKPD baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur oleh Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Di tahun pertama berdirinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Dr.H. Burhanuddin Noor, SE, M.Si yang pensiun pada tanggal 1 September 2017. Selanjutnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah Johan Arifin, AP, MM yang juga merupakan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Sebagian besar aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan mutasi dari Dinas Perhubungan dan Bagian Pembangunan Setdako Kota Banjarbaru.

## BAB VII

## PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Beban dan rekonsiliasinya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan Beban maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berjalan sekaligus sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, Februari 2017

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kota Banjarbaru,**

**JOHAN ARIFIN,AP,MM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.19750328 199501 1 001**